



# Buletin Parlementaria

Nomor 1209/IV/VII/2022 • Juli 2022



## Komisi I Dukung Koarmada III Wujudkan Kekuatan Pertahanan di Laut



**3 Puan Maharani:  
Dorong Pemuda  
Terlibat Dalam  
Pencapaian SDGs**



**17 Waspada Varian Omicron  
Baru, Masyarakat  
Diminta Waspada Tanpa  
Harus Panik**



9 772614 339005



# Komisi I Dukung Koarmada III Wujudkan Kekuatan Pertahanan di Laut



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono bertukar cenderamata dengan Pangkoarmada III.

**K**omisi I DPR RI mendukung Markas Komando Armada III Sorong untuk melakukan langkah strategis guna terwujudnya pembangunan kekuatan pertahanan negara di laut. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menjelaskan, dukungan tersebut pertama yaitu mendukung Koarmada III melakukan pembangunan sarana prasarana berupa pengadaan/ dispersi unsur *striking force*, penambahan titik bekul B-0, pembangunan *shelter helly* dan pesud di Bandara Deo Sorong, serta gudang fasilitas senjata di Pulau Makmak dan Raja Ampat.

"Kehadiran Koarmada III di Kota Sorong sebagai implikasi

”

**KEHADIRAN KOARMADA III DI KOTA SORONG SEBAGAI IMPLIKASI PENEGAKAN KEDAULATAN DI WILAYAH TIMUR INDONESIA.**

penegakan kedaulatan di wilayah Timur Indonesia. Oleh karena itu kami dukung perbaikan atau penambahan sarana prasarana yang dibutuhkan Koarmada III," kata Bambang usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI bersama Panglima Komando

Armada III Laksamana Muda TNI Irvansyah beserta jajaran, di Markas Komando Armada III, Sorong, Papua Barat, Jumat (15/7).

Yang kedua, kata Bambang, Komisi I DPR RI mendukung Koarmada III dalam menyediakan SDM sesuai kebutuhan guna mendukung tersedia sekolah unggul. Ketiga mengoptimalkan kerja sama dengan industri strategis dan terselenggaranya ahli teknologi. Selanjutnya, masih kata Bambang, Komisi I DPR RI mendorong adanya perbaikan berbagai kebijakan dan rencana pembangunan di lingkungan Koarmada III yang sesuai dengan skala prioritas termasuk pembenahan dalam mitigasi adanya ragam ancaman pertahanan keamanan di wilayah NKRI dan pemenuhan alutsista yang sesuai dengan kebutuhan.

Kesejahteraan juga menjadi perhatian penting Komisi I DPR RI. Bambang mengingatkan agar Kementerian Pertahanan memberikan perhatian lebih terhadap prajurit-prajurit yang bertugas di luar Pulau Jawa, khususnya di Sorong ini. "Kesejahteraan juga menjadi salah satu yang diprioritaskan, mengingat harga bahan pokok di Papua ini, di Sorong tidak sama dengan di Pulau Jawa. Jadi untuk kesejahteraan tetap pada standar yang normal," tandas politisi Partai Gerindra tersebut.

Yang terakhir, jelas Bambang, Komisi I DPR RI akan menindaklanjuti permintaan dari Pangkoarmada III untuk membangun sarana olahraga di lingkungan Markas Besar Koarmada III Sorong. "Sangat diperlukan adalah adanya sarana olahraga. Karena di sini berbeda dengan di Jakarta. Misal di Jakarta tidak ada, kita bisa cari di luar, tetapi kalau Sorong kan, kalau tidak ada, tidak ada juga di luar sana. Salah satu sarana olahraga yang menjadi mereka minta untuk diprioritaskan, mudah-mudahan kita bisa perjuangkan," tutup legislator dapil Nusa Tenggara Barat II itu. ● qq/sf

FOTO: RIKU/NVL

Scan QR untuk berita selengkapny





# Puan Maharani Dorong Pemuda Terlibat dalam Pencapaian SDGs



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani Puan berfoto bersama delegasi dan perwakilan Networking Night dalam rangkaian Y20 Indonesia 2022 Summit.

**K**etua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani Puan mendorong agar pemuda menjadi bagian dari proses pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang membutuhkan bantuan semua elemen, termasuk dari generasi muda. Itu artinya, semua ini adalah proses inklusif dengan tujuan menyelesaikan krisis global.

"Jika pemuda ingin melihat perubahan, reformasi, dan mempengaruhi dunia dengan ide-ide kalian, maka mulailah membuat komitmen yang berani. Dan pemuda perlu mengambil partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan," tegas Puan saat menyampaikan sambutan di kegiatan *Networking Night* dalam rangkaian Y20 Indonesia 2022 Summit di Jakarta, Minggu (17/7).

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu juga memberikan tantangan

kepada pemuda dunia agar bisa menerjemahkan berbagai komitmen dalam tindakan nyata di lapangan. Ia mengajak pemuda bekerja sama untuk menciptakan dunia yang nyaman bagi semua generasi.

"Dunia yang lebih berkelanjutan, damai, dan adil. Sebuah dunia di mana kaum muda mampu memanfaatkan potensi penuh mereka. Dengan demikian, kita akan dapat mengubah proses pemulihan menjadi dunia yang tangguh," kata politisi PDI-Perjuangan itu.

Hadir dalam acara *networking night* ini 59 orang yang terdiri dari 17 negara delegasi Y20. Kemudian juga ada perwakilan dari organisasi dunia yakni WTO, ADB, dan ASEAN. Selain itu ada pula beberapa Anggota DPR. Lima Co-chair Y20 Indonesia yakni Michael Victor Sianipar, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Budy Sugandi, Indra Dwi Prasetyo, dan Nurul Hidayatul Ummah pun turut hadir meramalkan acara. • **sf**



## Komisi I Dukung Koarmada III Wujudkan Kekuatan Pertahanan di Laut



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**  
Wiryawan Narendro Putro, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)  
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**  
Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi

**REDAKTUR FOTO**  
M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**  
Rizka Arinindy, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askarnal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Fauzail, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irianidi, Surahmat Eko Budi Setiantono, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnarcha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonce Sitomput, Zulfikar Mubien

**FOTOGRAFER**  
Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budianti, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

**ANALIS MEDIA**  
Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciaini, Riska Ramadhani

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

**IT MEDIA DIGITAL**  
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Yudi Kresna

**ADMINISTRASI**  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa, Made Chrisna Dwipa  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dprp.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Penembakan di Papua, DPR Minta Pemerintah Segera Buat Markas Militer Permanen



FOTO: OJI/NVL

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno saat menjadi narasumber dalam diskusi 'Dialektika Demokrasi'.

**A**nggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menyoroti penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menewaskan 10 orang di Kabupaten Nduga, Papua. Ia mendorong pemerintah segera membentuk markas militer secara permanen di Papua untuk menyelesaikan persoalan secara komprehensif dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurutnya, langkah itu diperlukan karena kondisi di Papua yang masih terjadi ancaman dari kelompok separatis sehingga membuat situasi mencekam.

"Saya mendorong dibentuk markas-markas militer di Papua bersifat permanen seperti Kodam, Kodim, Koramil, dan pos jaga militer," kata Dave dalam diskusi Dialektika

Demokrasi bertajuk "KKB Papua Kembali Berulah, di Mana Kehadiran Negara?" di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, selama ini Satuan Tugas (Satgas) yang ada di Papua sifatnya temporer atau sementara dengan masa tugas sekitar 6-12 bulan sehingga kurang maksimal dalam melakukan pendekatan kultural kepada masyarakat. Dave berharap dengan keberadaan markas militer secara permanen, akan terbangun ikatan batin yang kuat dengan masyarakat di Papua sehingga dapat memperkuat dan membangun kecintaan kepada NKRI.

"Markas militer bersifat permanen itu agar terjalin komunikasi yang intens dengan masyarakat sehingga saling memperkuat dan membangun

kecintaan pada NKRI," ujarnya. Dave menambahkan, berbagai tindak kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan KKB di Papua, yang terus dilakukan terutama korbannya adalah masyarakat sipil seperti ustaz, pendeta, dan tokoh agama.

Menurut Dave, kekerasan tersebut terus berulang, namun justru mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional. "Mereka bersembunyi bahwa yang dilakukan KKB bukan terorisme, namun pejuang kebebasan, memperjuangkan hak-hak yang tertindas," kata Dave sembari menilai, untuk menyelesaikan persoalan tersebut perlu penegakan hukum pada pihak yang mendukung tindakan KKB secara logistik, dana, peralatan, intelijen dan lain-lain. • **tn/aha**



# Perjuangkan Nasib Honorer Menjadi PPPK, Komisi II Soroti Ketidakjelasan Data

**W**akil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyoroti data tenaga honorer

yang hingga saat ini masih belum menemui titik terang, karena masih sering terjadi perubahan terkait dengan jumlah. Saan menyampaikan, pihaknya kesulitan untuk membahas lebih lanjut masalah tenaga honorer ini dengan pemerintah, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Oleh karena itu, menurut Saan, dibutuhkan data jumlah tenaga

Gubernur Kepulauan Riau, Kakanwil BPN Kepri, Kepala Ombudsman Kepri, Ketua KPU Kepri, Ketua Bawaslu Kepri, di Kepri, Senin (11/7).

"Itu menjadi kesulitan bagi kami di Komisi II ketika ingin menyampaikan ke Kementerian PAN-RB dan BKN. Yang mereka mau menjadi PPPK, tetapi karena data honorer itu berubah ubah. Kita minta untuk segera perbaiki untuk memberikan kepastian bahwa honorer di setiap

daerah itu datanya sekian, jadi itu bisa memudahkan kami di Komisi II untuk memperjuangkan para tenaga honorer menjadi PPPK," tutur Saan.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII ini menambahkan, meskipun diprioritaskan untuk diangkat menjadi PPPK, pemerintah juga harus tetap melakukan prinsip kehati-hatian dan juga profesionalitas dalam proses pengangkatan tenaga honorer ini.

"Terkadang PPPK menjadi beban pemerintah daerah, maka penting juga terkait dengan penerimaan honorer yang nantinya menjadi PPPK ini harus benar benar selektif dan hati hati. Karena kita ingin persoalan ini tidak berlarut larut karena itu kepastian jumlah honorer menjadi sangat penting, jika data ini belum selesai juga ini akan menjadi persoalan itu sendiri," tutup politisi Partai NasDem ini. • **pdt/sf**

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa.

”

**PPPK INI HARUS BENAR BENAR SELEKTIF DAN HATI HATI. KARENA KITA INGIN PERSOALAN INI TIDAK BERLARUT LARUT**

honorer yang jelas agar dapat diperjuangkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Demikian diungkapkan Saan dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan Wakil



FOTO: PRIMAK/NWL

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



# Perlu Rumusan Nasional untuk Pembatalan Produk Sertifikat Tanah Ganda



Anggota Komisi II DPR RI Riyanta.

**A**nggota Komisi II DPR RI Riyanta mengatakan, terkait dengan pembatalan produk administrasi seperti sertifikat tanah ganda yang diterbitkan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) perlu ada rumusan secara nasional dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Saat ini muncul beberapa pemberitaan yaitu ada sertifikat tanah ganda dan ini saya yakin

banyak, *lha* ini bagaimana BPN secara kelembagaan bisa melakukan upaya-upaya administrasi untuk membatalkan sertifikat yang muncul setelah

”

**KOMISI II DPR RI TENTU FOKUS BAGAIMANA KEJAHATAN PERTANAHAN INI BISA DISELESAIKAN SECARA TUNTAS,**

yang pertama," katanya usai mengikuti kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI ke Denpasar, Provinsi Bali, Senin (11/7).

Politisi PDI-Perjuangan itu melanjutkan, jadi setelah muncul sertifikat yang kedua, ketiga dan seterusnya harus dibatalkan secara administrasi langsung dari Kementerian ATR/BPN. Hal tersebut merupakan produk administrasi negara harus sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang berlaku.

"Jadi jangan sampai persoalan-persoalan sengketa pertanahan dan konflik pertanahan, ketika masyarakat berupaya diselesaikan secara mediasi tetapi dari internal negara yang dalam hal ini adalah BPN, itu menyarankan pada para pihak untuk diselesaikan baik melalui perdata maupun pidana, ini tidak *fair*, karena ini negara," tegasnya.

Legislator dapil Jawa Tengah III itu menambahkan, ketika ditemukan dokumen palsu (sertifikat tanah ganda) secara kelembagaan, DPR bisa melaporkan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar hal tersebut bisa diproses dan tidak terulang kembali.

"Komisi II DPR RI tentu fokus bagaimana kejahatan pertanahan ini bisa diselesaikan secara tuntas, apalagi presiden telah mengeluarkan kebijakan politik berupa peraturan presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, keputusan politiknya sudah benar, tinggal bagaimana bisa dilaksanakan operasionalnya," tutupnya. ● cas/aha





# Jelang Pemilu 2024, Legislator Dorong Penyelenggara Segera Sosialisasikan PKPU

**P**emilihan Umum (Pemilu) 2024 akan segera berlangsung, oleh karena itu diharapkan persiapan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Dalam kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI ke Riau, Anggota Komisi II DPR RI Arsyadjuliandi Rachman mendorong

agar pihak penyelenggara dapat segera mensosialisasikan aturan dan tahapan Pemilu tersebut.

"Jadi kami berharap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tersebut segera disosialisasikan dari pusat kepada KPU provinsi dan jajarannya sampai ke bawah, sehingga Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak tahun 2024 nanti dapat berjalan dengan baik dan demokrasi yang kita harapkan tercapai," terang Andi Rachman sapaan akrabnya, saat pertemuan Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Riau, serta dan KPU dan Bawaslu di Pekanbaru, Riau, Senin (11/7).

Legislator dapil Riau I itu menambahkan, Provinsi Riau sendiri telah memiliki pengalaman mengadakan Pilkada serentak dengan penyelenggaraan yang baik. Adapun berdasarkan evaluasi pemilihan serentak 2020 lalu,

**Anggota Komisi II DPR RI  
Arsyadjuliandi Rachman.**

”

**PERATURAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM (PKPU)  
TERSEBUT SEGERA  
DISOSIALISASIKAN  
DARI PUSAT KEPADA  
KPU PROVINSI DAN  
JAJARANNYA SAMPAI KE  
BAWAH**

permasalahan yang muncul terkait dengan daftar pemilih masih tidak jauh berbeda dengan pemilu dan pemilihan sebelumnya.

Permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih sudah muncul saat di hulu, yakni dalam proses sinkronisasi daftar DPT Pemilu/pemilihan terakhir yang dimiliki KPU dengan DP4 dari pemerintah. Faktanya ditemukan banyak pemilih yang sudah masuk dalam DPT pemilu/pemilihan terakhir ternyata tidak masuk dalam daftar pemilih.

Oleh karena itu dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI Guspardy Gaus menyoroti soal data pemilih, yang mana saat ini disepakati menggunakan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yang dimutakhirkan. "Persoalan data pemilih diharapkan jangan terulang lagi persoalan-persoalan yang lama," ungkap Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. • aha

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



FOTO: AGUNG/NVL

# Komisi III Apresiasi Kinerja Kejati Provinsi NTB

**W**akil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir mengapresiasi kinerja

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang bisa mengamankan kerugian negara, jumlahnya kurang lebih mencapai Rp150 miliar. Padahal kondisi anggaran penyelidikan dan penyidikan Kejati NTB mengalami kekurangan dana, tapi tetap bisa menyelesaikan berbagai kasus.

"Walaupun sudah memiliki kinerja yang bagus, kita tetap ingin Kejati NTB terus meningkatkan kinerjanya walaupun ada

kekurangan-kekurangan terkait anggaran penyelidikan dan penyidikan. Ini masukan buat Komisi III DPR dimana Kejati NTB tidak memiliki dana yang cukup tetapi bisa menyelesaikan kasus, perlu dievaluasi untuk anggaran penyelidikan dan penyidikannya," ujar Adies saat memimpin Rapat Kerja Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI dengan Kajati NTB beserta jajaran, di Kota Mataram, NTB, Rabu (20/7).

Selain itu, kata politisi Partai Golkar ini, Kajati NTB juga menyampaikan aspirasinya terkait pengadaan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Pasalnya, Pengadilan Tipikor di NTB ini masih

jarang dan jaraknya cukup jauh, saat ini hanya ada di Kota Mataram. "Terkait hal ini nanti kita carikan solusi dipusat perihal pengadaan pengadilan Tipikor ini. Mengingat kinerja Kejati NTB di sini sudah cukup baik," pungkas Adies.

Adies juga memberikan apresiasi kepada jajaran Kejati NTB yang telah membuat tempat rehabilitasi yang cukup bagus dan representatif. Menurutnya ini adalah langkah yang bagus dari aparat penegak hukum dalam rangka mengurangi kelebihan kapasitas lapas, dimana hampir 70 persennya lapas di Indonesia diisi napi kasus narkoba.

"Memang Jaksa Agung kita ini sangat luar biasa, banyak inovasi seperti pembangunan Rumah *Restorative Justice* dan penyelesaian kasus-kasus kakap yang dikerjakan oleh Jaksa Agung, mudah-mudahan semangat ini bisa sampai ke daerah-daerah untuk menyelesaikan kasus-kasus besar yang merugikan negara kita," tutup legislator dapil Jawa Timur I ini. • **jka/aha**



Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir saat memimpin Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan jajaran Kejati NTB.





# Pemanfaatan Kawasan Hutan di Kabupaten Morowali Perlu Kehati-hatian



FOTO: ICHA/ANL

Wakil Ketua Komisi IV DPR Rusdi Masse Mappasessu saat Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Sulteng.

**W**akil Ketua Komisi IV DPR Rusdi Masse Mappasessu menyampaikan

bahwa Komisi IV DPR RI menindaklanjuti surat yang masuk dari Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, terkait kuota persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH). Rusdi menekankan bahwa pemanfaatan kawasan hutan di Morowali untuk kegiatan pertambangan perlu kehati-hatian.

"Kami datang ke sini (Sulteng) untuk mendengar secara langsung, baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kementerian, dan PT Vale Indonesia Tbk. Bahwa di surat tersebut kuota PPKH sudah habis di Kabupaten Morowali, sedangkan masih banyak perusahaan yang bermohon tapi

tidak bisa mendapatkan PPKH karena habisnya kuota," jelas Rusdi dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis, (14/7).

Rusdi memaparkan, kegiatan pertambangan di kawasan hutan Indonesia menggunakan suatu izin khusus, yakni PPKH, yang tujuannya membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan strategis atau kepentingan umum terbatas di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi, dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Ia menambahkan, PPKH juga penting karena dapat menghindari terjadinya *enclave* di kawasan hutan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

"Salah satu kegiatan pemanfaatan kawasan hutan melalui aktivitas penambangan yaitu dilakukan oleh PT Vale Indonesia Tbk, yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan Penanaman Modal Asing (PMA) yang memanfaatkan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi dan operasi produksi penambangan biji nikel," papar Rusdi. Politisi Partai NasDem itu juga menerangkan bahwa PT Vale Indonesia telah memperoleh satu PPKH Eksplorasi seluas 17.239,28 Ha dan enam PPKH Operasi Produksi seluas 39.038,07 Ha.

Diketahui, PPKH Eksplorasi dan Produksi tersebut tersebar di tiga provinsi Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. "Rincian PPKH yang terletak di Kabupaten Morowali (Blok Bahodopi) yaitu seluas 15.521,93 Ha," ujar Rusdi. Ia pun meminta agar seluruh *stakeholder*, memperhatikan tingginya aktivitas pertambangan di kawasan hutan. Rusdi menilai hal tersebut dapat meningkatkan dampak kerusakan lingkungan.

"Bahkan bisa memberikan konsekuensi serius, tidak hanya untuk daerah setempat tetapi juga wilayah secara global. Semangat untuk menggerakkan ekonomi melalui aktivitas pertambangan dapat menghadirkan berbagai macam permasalahan bila tidak mengikuti pola pengelolaan hutan dan lingkungan hidup dengan baik," jelas Rusdi dalam pemaparannya. • **ica/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Komisi IV Soroti Kekurangan Sumber Air di Sumba Tengah

**T**im Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI yang dipimpin oleh Anggota Komisi IV DPR RI Edward Tannur meninjau lokasi Mesin Pengering (Dryer) serta penggilingan padi atau *Rice Milling Unit* (RMU) di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan berguna bagi petani untuk mengolah proses mulai dari gabah hingga menjadi beras dengan efektif dan efisien dalam sekali alur. Unit ini dikelola bersama oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan) bersama bernama 'Pro Oli Mila Parewa Tana'.

Setelah meninjau mesin *Dryer* dan RMU, Komisi IV DPR RI menggelar pertemuan dengan Sekretaris Daerah Sumba Tengah dan mitra kerja terkait untuk membahas *food estate*. Dalam pertemuan terungkap, melalui program *food estate*, pendapatan produksi pertanian di Sumba Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dasar penempatan lumbung pangan atau *food estate* di Sumba Tengah karena 34 persen angka kemiskinan ada di wilayah tersebut, di mana tingkat kemiskinan di NTT mencapai 16 persen.

"Jadi harus diingat *food estate* untuk mempersiapkan ketahanan pangan nasional juga untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Kemudian dapat menghilangkan busung lapar, jika makanan cukup pasti rakyatnya akan sehat, negara kuat," ungkap Anggota Komisi IV DPR RI Edward Tannur, usai memimpin Komisi IV DPR RI meninjau lokasi RMU di Desa Umbu Pabal Selatan,



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI saat meninjau lokasi RMU di Desa Umbu Pabal Selatan, Sumba.

**PETANI BERHARAP MELALUI KOMISI IV DPR RI DAPAT MEMBANTU SUMBA TENGAH UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN KEKURANGAN SUMBER DAYA AIR**

Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Sumba Tengah, NTT, Selasa (13/7).

Selain mengenai cukup besarnya angka kemiskinan di Sumba Tengah, hal lain yang menjadi perhatian penting adalah masyarakat di daerah ini masih kekurangan air. Dari penyampaian aspirasi, petani berharap melalui Komisi IV DPR RI dapat membantu Sumba Tengah untuk mengatasi permasalahan

kekurangan sumber daya air ini mengingat air merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Edward sangat memberikan perhatian khusus terkait permasalahan air ini, ia berharap dan akan berusaha agar Sumba Tengah dapat memiliki bendungan air.

"Kekurangan yang mendasar itu sumber daya air jadi sementara aspirasi yang diserap pembangunan embung, tapi itu untuk mengatasi sementara. Kemudian yang permanen juga harus ada yaitu (membangun) bendungan, karena bendungan dapat menampung debit air yang cukup besar dan dari air hujan juga bisa ditampung. Kemungkinan kalau ada air bisa panen setahun 2 sampai 3 kali, sekarang sudah susah, susai air jadi kekeringan," pungkas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur II tersebut. • nvl/sf

FOTO: NOVEL/NVL

Scan QR untuk berita selengkapnyanya







# Berdayakan Potensi Pertanian dan UMKM, Dwita Ria Gunadi Apresiasi Capaian Pemprov Lampung

**A**nggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi mengapresiasi capaian kerja jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) yang berupaya memajukan sektor pertanian dan UMKM. Baginya, serangkaian pencapaian yang

telah diraih ini harus tetap dijaga dan tetap dilanjutkan pada periode mendatang.

Hal tersebut disampaikan Dwita dalam pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi beserta jajaran Pemrov Lampung, di Manan Agung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Rabu (13/7). Pencapaian

kerja ini, bagi politisi Partai Gerindra tersebut, telah membawa Lampung pada pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang lebih baik.

"Saya mengapresiasi pencapaian kerja Provinsi Lampung melalui 25 program kerja yang telah dilakukan. Sebelumnya, kami (Komisi IV DPR RI) sudah mengunjungi



## MENGAPREASIASI PENCAPAIAN KERJA PROVINSI LAMPUNG MELALUI 25 PROGRAM KERJA YANG TELAH DILAKUKAN.

Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kami pun mengapresiasi upaya memanfaatkan potensi pertanian di sana dan UMKM-nya juga," ungkap legislator dapil Lampung II tersebut.

Dwita bangga dengan pertumbuhan ekonomi Lampung masa triwulan I tahun 2022 yang tumbuh sebesar 2,96 persen, dibandingkan masa triwulan I tahun 2021. Berdasarkan informasi BPS Tahun 2022, sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan di Lampung tumbuh sangat tinggi pada Triwulan I 2022 sebesar 15,10 persen. Tentu saja, baginya, hal ini menjadi kabar yang sangat baik, terutama pada masa pandemi Covid-19.

Terakhir, Dwita menyoroti penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Lampung. Dengan diserahkannya vaksin PMK tahap II sebanyak 50.000 dosis oleh Kementerian Pertanian kepada Pemrov Lampung, ia menegaskan agar penanggulangan dampak PMK di Indonesia, khususnya di Lampung, segera tertangani. Ia pun meminta Kementan menepati janji untuk menjadikan Lampung sebagai zona wilayah bebas PMK. ● ts/sf



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI bersama Gubernur Lampung.

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Novita Wijayanti Dorong Infrastruktur Jalan jadi Prioritas Pembangunan di Maluku Utara



FOTO: EKI/NVL

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Maluku Utara.

Pemindahan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi membuat alokasi APBN untuk Maluku Utara menjadi terpecah. Hal itu membuat percepatan pembangunan infrastruktur sedikit terhambat. Untuk itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mendorong adanya prioritas dalam percepatan pembangunan di Maluku Utara. Menurutnya, hal yang perlu menjadi prioritas adalah pembangunan jalan.

"Karena jalan memang penting untuk lalu lintas, transportasi, juga agar perekonomian bisa meningkat. Apalagi di sini banyak tambang juga, maka saya mendorong Kementerian

PUPR untuk mendukung infrastruktur jalan," kata Novita usai mengikuti Tim Kunjungan Kerja reses Komisi V DPR RI meninjau lokasi pemukiman kumuh di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (8/7).

Mengenai pendanaan jalan, Novita sedikit menyinggung Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Ia berharap dengan adanya perubahan dalam UU Jalan tersebut, pembangunan jalan bisa lebih dipercepat karena salah satu perubahannya mengatur pendanaan jalan yang lebih fleksibel. "Nah ini turunan aturan-aturannya sedang

disusun sehingga kita masih menunggu. Tetapi tetap diusulkan saja menjadi prioritas yang bisa dibangun," papar politisi Partai Gerindra tersebut.

Selain menentukan prioritas, Novita juga meminta pemerintah pusat untuk memberikan timbal balik kepada pemerintah daerah di Maluku Utara atas eksplorasi tambang di Maluku Utara. "Di Maluku Utara kan banyak penambangan juga, nah pemerintah daerah harus mendapatkan *feedback* dari tambang yang dilakukan pemerintah pusat," pesan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu. • eki/sf





# Pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas Butuh Dukungan Masyarakat

"Nah saat ini kami yang berada di Komisi V, termasuk dengan Pak Lasarus (Ketua Komisi V DPR RI) juga mengawal pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I, dan ini sudah menemui titik terang," ungkap Syarif saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (12/7).

Anggota dewan daerah pemilihan (dapil) Kalbar I ini memastikan pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I akan segera dimulai. Ia menerangkan bahwa saat ini sudah terdapat pemenang tender dan sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti. "Pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I sudah lelang dan sudah penetapan pemenang," ujarnya.

Syarief memprediksi jika proses pembangunan lancar, maka tahun depan pembangunan akan rampung. "Saya kira pada 2023 sudah selesai. Masyarakat harus mendukung setiap program pembangunan. Tanpa dukungan masyarakat tidak bisa lancar. Pembangunan itu akan membantu masyarakat. Saya berharap masyarakat bersama mensukseskan pembangunan itu," jelas politisi Partai NasDem tersebut. • **eko/aha**

Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie.

**A**nggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengungkapkan pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I telah menjadi prioritas. Menurutnya, duplikasi Jembatan Landak itu cukup efektif untuk mengurangi kemacetan di kawasan Pontianak timur menuju Pontianak utara. Ia pun meminta dukungan seluruh masyarakat dan pihak terkait di Kota Pontianak agar dapat turut mengawal proses pembangunan duplikasi jembatan tersebut.

”

**MASYARAKAT HARUS MENDUKUNG SETIAP PROGRAM PEMBANGUNAN. TANPA DUKUNGAN MASYARAKAT TIDAK BISA LANCAR. PEMBANGUNAN ITU AKAN MEMBANTU MASYARAKAT.**

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



# Mesakh Mirin: Kemenhub Harus Segera Benahi Bandara di Papua



Anggota komisi V DPR RI Mesakh Mirin.

**A**nggota Komisi V DPR RI Mesakh Mirin mengatakan, moda transportasi di Papua sangat dibutuhkan untuk bisa mengakses keseluruhan pelosok-pelosok yang ada di Papua. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan selaku mitra kerja dari Komisi V DPR RI harus melakukan pembenahan untuk lapangan terbang yang dapat digunakan untuk armada transportasi, khususnya pesawat kecil

Hal tersebut disampaikan Mesakh usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dengan jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, perwakilan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), manajemen Angkasa Pura I, BMKG, BNPP, LPPNPI (AirNav) serta kepala bandara se-Papua, di Jayapura, Papua, Selasa (12/7).

"Papua ini kan, membutuhkan transportasi udara. Saya melihat dari kacamata pribadi sebagai anggota Komisi V DPR RI yang mewakili masyarakat Papua, yang harus dibenahi oleh Kementerian Perhubungan adalah terutama lapangan terbang misalnya, untuk pesawat armada yang kecil itu harus dibenahi sehingga masyarakat di Papua ini bisa terlayani dengan baik," ucap Mesakh.

Anggota dewan dapil Papua itu menjelaskan sebagian

masyarakat di Papua untuk akses ke daerah pelosok seperti pesisir pantai dan pegunungan masih mengalami keterbatasan akses. Hal itu dikarenakan biaya transportasi yang tergolong mahal. Oleh karenanya, menurut Mesakh harus ada kemudahan kemudahan untuk masyarakat Papua yang ingin berkunjung dari satu daerah ke daerah lain di wilayah Papua.

"Hampir semua masyarakat 60 persen jumlah penduduk di Papua itu ada sebagian besar di pesisir pantai dan di pegunungan, kalau khusus di pesisir pantai bisa disiapkan armada pesawat dan armada kapal yang bisa melayani dari keterbatasan dengan harga relatif terjangkau," jelas Mesakh. • **afr/aha**



# Kemenag Didesak Segera **Terbitkan** **Aturan Pengawasan** **Cegah Kekerasan** **Seksual**

**W**akil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mendesak Kementerian

Agama (Kemenag) segera menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama. Hal ini menyusul banyak ditemukannya kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren. Menurutnya, kepercayaan masyarakat kepada lembaga pendidikan agama cukup tinggi.

Oleh karenanya, ujar Diah, sistem pengawasan dan pencegahan harus dilakukan secara efektif guna menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. "Urgensi dari Permenag ini cukup tinggi. Aturan ini bisa menjadi sistem pengawasan dalam institusi pendidikan keagamaan, sehingga mencegah ruang terjadinya kekerasan seksual," kata Diah, dalam keterangan persnya, baru-baru ini.

Permenag soal pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama disebut sudah masuk tahap harmonisasi antar-kementerian atau lembaga terkait. Diah mengingatkan agar aturan ini disosialisasikan secara maksimal. Ia juga meminta agar sistem pengawasan yang dibuat Kemenag ini nantinya lebih bersifat praktis.

Hal tersebut lantaran selama ini pengawasan Kemenag kepada lembaga pendidikan agama masih terasa bersifat retorik atau normatif. "Sebaiknya sampai pada SOP yang sifatnya operatif untuk diterapkan sistem pengawasannya di dalam lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Jadi pengawasannya harus lebih *practical* sifatnya," usul politisi PDI-Perjuangan itu.

Diah menilai kasus kekerasan seksual yang terungkap di sejumlah pesantren belakangan ini hendaknya menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan yang selama ini dilakukan. "Perlu ada yang dievaluasi di mana kelemahannya.

**Wakil Ketua Komisi VIII  
DPR RI Diah Pitaloka.**



FOTO: JAWA/NIL

Karena kalau berbicara lembaga pendidikan yang dinilai penting tidak hanya kurikulum, tapi termasuk juga bagaimana membangun lingkungan bagi para peserta didik yang aman," ujar Diah lebih lanjut.

Selain itu, imbau legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat III tersebut, sistem pengawasan dari lingkungan internal lembaga pendidikan agama pun diminta memprioritaskan pencegahan terjadinya kasus kekerasan seksual seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

"Baru ketika ada pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual, lalu evaluasinya gimana untuk sistem pengawasan itu. Hari ini saya lihat belum matang sebagai sebuah sistem di lembaga pendidikan. Saya yakin masih banyak yang baik dalam melakukan proses belajar mengajar. Maka dari itu, kita semua perlu menjaga bersama kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan keagamaan, jangan jadi buruk citranya karena kesalahan seseorang di dalamnya," pungkas Diah. • **rnmsf**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Komisi IX Pantau Isu Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan di Papua

**T**im Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka

Lena, merespon isu-isu yang ada di Provinsi Papua terkait dengan bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Papua yang nantinya akan menjadi bahan Komisi IX DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja.

Dalam bidang kesehatan, kata Melki, Komisi IX DPR RI menyoroti masih rendahnya jumlah peserta program vaksinasi sebagai penanganan pandemi Covid-19, jumlah stunting yang cukup tinggi sebanyak 29,5 persen, penyakit-penyakit katastrofik di Papua yang harus diurus dengan serius, sebagian besar masyarakat terutama Orang Asli Papua (OAP) yang belum

memiliki BPJS akibat tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta standar pembiayaan klaim BPJS ke rumah sakit di wilayah Papua sama dengan wilayah lain.

Terkait dengan kepesertaan BPJS oleh (OAP), Melki mengimbau agar tercipta sinergi BPJS Kesehatan dan Kartu Papua Sehat. "Harus ada sinergi antara BPJS Kesehatan dengan Kartu Papua Sehat produk pemerintah provinsi. Dan terkait dengan kepesertaan, Komisi IX masih memastikan agar NIK bagi masyarakat Papua dapat dioptimalkan. Sehingga masyarakat Papua bisa mendapatkan KTP. Kita juga meminta adanya intergrasi antara Kartu Papua Sehat dan BPJS Kesehatan supaya bisa lebih optimal untuk masyarakat di Tanah Papua," imbau Melki, di sela-sela pertemuan di Jayapura, Papua, Selasa (12/7).

Di bidang Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI juga terus

mendukung pemerintah dengan mendorong percepatan dan peningkatan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja sebagaimana telah dituangkan dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Inpres Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya bagi pekerja. Demi menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pekerja sehingga optimisme bekerja dan keselamatan mereka kembali tumbuh di tengah pandemi. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis program ketenagakerjaan di Papua.

Politisi Partai Golkar ini berharap adanya dukungan, sinergi dan keselarasan, implementasi dari program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan pembangunan di Papua. "Dengan adanya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang implementasinya ada di daerah, kami (Komisi IX) sangat mengharapkan adanya dukungan, sinergitas dan keselarasan kebijakan yang dicanangkan daerah. Sehingga hasil akhirnya diharapkan terjadi peningkatan pembangunan kesehatan, kependudukan, dan ketenagakerjaan di Papua," tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur II. ● **mcn/sf**



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena memimpin Kunker Reses Komisi IX DPR RI ke Papua.





# Waspada Varian Omicron Baru, Masyarakat Diminta Waspada Tanpa Harus Panik

**A**nggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan munculnya subvarian terbaru dari Covid-19 Omicron, yaitu BA.2.75 di Indonesia harus mendapat perhatian serius dari semua pihak. Untuk itu ia mengimbau masyarakat dapat mewaspada penyebaran tersebut tanpa perlu panik.

"Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 belum mereda, kini muncul lagi varian baru yang berpotensi lebih menular, yakni BA.2.75. Kita memang tak perlu panik tapi fakta bahwa BA.2.75 sudah terdeteksi di Indonesia harus membuat kita lebih waspada dan berhati-hati," kata Rahmad dalam keterangan tertulisnya kepada **Parlementaria**, Selasa (19/7).

Politisi PDI-Perjuangan menambahkan, varian BA.2.75 yang pertama kali terdeteksi di India pada Mei lalu disebut-sebut penularannya lebih cepat dari varian BA.5 yang sangat menular. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengategorikan subvarian ini sebagai *Variant of Concern (VOC) Lineage Under Monitoring (LUM)*. Artinya, varian ini tengah diawasi secara ketat oleh WHO.

Ia mengatakan, varian terbaru BA.2.75, juga varian BA.4 dan BA.5 ini saat ini belum membebani



Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo.

FOTO: RUNI/NVL

rumah sakit maupun lebih berisiko dibandingkan Delta dari data yang ada. Akan tetapi, berkaca dari kasus yang terjadi di beberapa negara, misalnya Amerika, di mana saat ini kasus Covid di negara Paman Sam tersebut 80 persen didominasi varian BA.2. "Nah fakta ini harus membuat kita semakin waspada sebab covid masih ada dan kita belum tahu kapan berakhir," imbuhnya.

Dikatakan, secara global penularan Covid-19 masih sangat dinamis. Bahkan, Rahmad mencontohkan kasus di beberapa negara ada yang melampaui 100 ribu kasus per hari. "Artinya, meskipun saat ini kita masih terbilang landau, tapi kasus varian BA.4 dan BA.5 terus mengalami kenaikan. Tentu kondisi seperti ini menuntut langkah cepat pemerintah pusat, pemerintah daerah, para epidemiolog dan seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong menghadapi Covid-19, agar tidak kecolongan," katanya.

Terkait dengan kondisi yang serba tak menentu saat ini, Rahmad menyampaikan beberapa catatan penting yang menurutnya harus disampaikan semua pihak. Pertama, istilah *Immunity* Indonesia yang belakangan ini sempat digembar-gemborkan, jangan sampai jadi 'Jebakan Batman'. Jangan sampai istilah tersebut mengesankan bahwa masyarakat sudah kebal berkelompok sehingga bisa bereuforia, bisa meninggalkan masker, tidak mengindahkan protokol kesehatan ini tidak boleh terjadi.

"Salah kaprah seperti ini sangat berisiko karena varian BA.4 dan BA.5 dan subvarian baru terdeteksi BA.2.75 pun masih bisa menembus tubuh yang sudah di vaksin *booster* sekalipun efek positif *booster* memang menghindarkan rasa sakit serius sampai kematian," tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V itu. ● **ann/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



# Komisi X Apresiasi Gedung Baru Perpustakaan Daerah Kendal



Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI meninjau gedung baru Perpustakaan Umum Daerah (Perpusda) Kendal.

**T**im Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meninjau gedung baru Perpustakaan Umum Daerah (Perpusda) Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat (15/7). Gedung yang berlokasi di Karangsari, Kabupaten Kendal ini belum lama diresmikan oleh Bupati Kendal.

"Saya mengapresiasi keberadaan gedung baru Perpusda Kendal. Dengan dikembangkannya fasilitas dan tempat di Perpusda Kendal ini, saya berharap literasi masyarakat dalam membaca buku terus meningkat. Dengan demikian, tentu dengan berkembangnya

Perpusda itu akan bisa menunjang pendidikan yang ada di Kendal," ungkap Hetifah.

Usai mengunjungi dan melihat langsung kondisi gedung baru Perpusda Kendal, politisi Partai Golkar ini menginginkan agar gedung baru tersebut tidak hanya bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat untuk membaca buku, namun Perpusda juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi masyarakat lainnya.

"Saya berharap, selain berfungsi sebagai perpustakaan, gedung baru ini juga bisa mentransfer atau dijadikan tempat untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan pendidikan

atau berbagai kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa menunjang pendidikan di Kendal," ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur tersebut.

Menurut Hetifah, saat ini minat baca masyarakat Kendal tinggi dan terus meningkat. Jadi untuk lebih mengembangkan Perpusda tersebut, Pemda Kendal harus bisa memberikan semangat dan fasilitas yang lebih baik lagi

ke masyarakat, misalnya tidak hanya menyediakan bahan-bahan bacaan fisik saja, namun juga harus menyediakan bacaan-bacaan secara digital. "Selain itu, juga harus bisa menciptakan insiatif yang bisa dikaitkan dengan literasi itu sendiri seperti, pariwisata olahraga dan lain sebagainya," tandas Hetifah.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kendal, Muhammad Yusuf Ariyanto mengatakan pembangunan gedung Perpusda Kendal senilai Rp10 miliar dari DAK Bidang Pendidikan tahun 2021 itu, pada tahun 2022 ini akan mulai pengisian pengadaan, baik untuk interior maupun eksterior. ● **oji/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



# Komisi X Minta Calon Guru PPP3 Ikuti Prosedur yang Berlaku

**A**nggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin meminta kepada masyarakat terutama guru dan pegawai perpustakaan honorer yang ingin segera diangkat menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Mengingat, tandas Djohar, jika guru mengurus di luar jalur prosedur, Komisi X DPR RI pun tidak mungkin dapat membantu.

"Kita harapkan, mereka ikuti prosedur yang ada untuk bisa diangkat jadi guru PPPK. Jadi saya katakan, jangan ada yang tidak ikuti prosedur, karena tidak mungkin kita membantu jika mereka tidak berada di jalur," tegas Djohar usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan Pj. Wali Kota Salatiga Sinoeng Noegroho Rachmadi dan mitra kerja Komisi X DPR RI di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (15/7).

Permasalahan lainnya yang disuarakan *stakeholder* di Salatiga, yaitu soal penerimaan murid baru atau penerimaan peserta didik baru (PPDB). Dimana hampir seluruh daerah yang dikunjungi Komisi X DPR RI merasa keberatan dan ketidakadilan dengan adanya sistem zonasi. Djohar menegaskan, pihaknya akan mendorong kebijakan tersebut untuk ditinjau ulang dan menghasilkan keputusan yang lebih baik bagi seluruh pihak.

"Ini jadi kajian kita, akan kita bahas bagaimanapun perbaikan-perbaikan ke depan harus kita lakukan, karena jika melihat masalahnya sangat kompleks. Bukan satu dua masalah. Masing-masing punya masalah,

maka ini harus kita inventarisir semua, dan akan kita bahas bersama (dengan mitra kerja). Sehingga nanti kita akan dapat suatu keputusan yang pasti lebih baik dari sekarang," ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Aspirasi selanjutnya, terkait dengan pegawai teknis perpustakaan, yang sangat berharap dapat memiliki kesempatan yang sama dengan para guru honorer, untuk dapat diangkat menjadi PPPK ataupun PNS. Djohar berharap pegawai honorer perpustakaan dapat memiliki kesempatan yang sama. Sementara terkait perguruan tinggi, Djohar meminta agar tidak berkutat pada akreditasi, melainkan meningkatkan inovasi, meningkatkan

*skill* mahasiswa, sehingga memiliki prestasi, yang dimiliki perguruan tinggi dan mahasiswa di dalamnya.

Sementara, Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mujahid menyerukan agar Pemerintah Kota Salatiga dan mitra kerja Komisi X DPR RI di Salatiga agar mengedepankan inovasi, kolaborasi dan digitalisasi. Mengingat, dengan jumlah penduduk Salatiga yang tidak terlalu banyak, bisa dijadikan potensi dalam mengembangkan sumber daya manusia di sektor formal maupun pendidikan masyarakat dan juga pendidikan kreativitas.

"Bagaimana mengembangkan unit-unit kreatif yang akan membangkitkan ekonomi dan dalam konteks ini ada tiga prinsip yang saya kira bagus dikembangkan.

Satu adalah inovasi semua unit. Semua kegiatan pendidikan kreativitas serta harus ada inovasi. Karena itu yang akan dicari masyarakat," kata politisi Partai Gerindra itu. • **ndy/sf**

Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin.



FOTO: NADYA/NVL

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Komisi X Ingatkan Dinas Pendidikan Demak Tak Paksakan Kurikulum Merdeka



Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah saat Kunker Reses Komisi X DPR RI ke Demak, Jawa Tengah.

**A**nggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengingatkan Dinas Pendidikan dan beberapa kepala sekolah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, untuk tidak memaksakan sekolah menggunakan Kurikulum Merdeka. Sebab ia menilai kurikulum tersebut masih memiliki beberapa kekurangan dalam penerapannya.

"Kami ingatkan untuk dinas pendidikan dan seluruh kepala sekolah di Kabupaten (Demak) ini untuk tidak paksakan sekolah dan para siswa mengikuti atau menjalankan Kurikulum Merdeka. Ini merupakan keputusan Panja

Kurikulum Merdeka Komisi X DPR RI," ungkap Ferdi saat Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Demak, Jawa Tengah, Jumat (16/7).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, Kurikulum Merdeka yang menjadi salah satu program pemerintah ini masih memiliki banyak kekurangan, alias belum siap. Kesiapan itu terlihat dari belum adanya dasar hukum yang jelas di awal program tersebut. Belum lagi konsep kurikulum yang belum jelas. Dimana pemerintah pun belum mampu menyediakan sarana dan prasarana (sarpras) yang dibutuhkan untuk mendukung Kurikulum Merdeka tersebut.

Bahkan, menurut Ferdi, pemerintah juga belum mampu memenuhi standar guru yang ditentukan oleh Kurikulum Merdeka tersebut. "Kalau kita lihat variabel-variabel pendukung kurikulum yang pernah ada seperti KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan Kurtilas (Kurikulum 2013), semua memiliki dasar hukum yang jelas. Kedua, terkait kajian akademis kenapa kurikulum sebelumnya harus berubah jadi kurikulum ini," tegas Ferdi.

"Kami mempersilahkan jika ingin perubahan kurikulum, tapi dasarnya, kajian akademisnya harus jelas dan kuat. (Lalu) bagaimana dengan tenaga pendidiknya, pustakawannya sudah ada atau belum. Ini merupakan hal yang sangat Penting dalam implementasi kurikulum merdeka belajar. Belum lagi bicara pelatihannya. Kurtilas kemarin saja masih banyak yang tertinggal sehingga guru banyak yang tidak memiliki buku teks," kata Ferdi.

Dari hal tersebut, ungkap Ferdi, Panja Kurikulum Merdeka Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memutuskan bahwa Kurikulum Merdeka ini bukan sebuah keharusan. "Tapi saya ingatkan di sini kepada kepala dinas pendidikan di Demak serta bapak ibu kepala sekolah, jangan jadikan siswa dan guru korban di kemudian hari. Siswa tidak untuk coba-coba dan guru juga jangan dijadikan ladang kesalahan," pungkas legislator daerah pemilihan Jawa Barat XI ini. ● [ayu/aha/sf](https://www.ayu/aha/sf)







# Kamrussamad Ingatkan Menkeu Jangan Anggap Remeh Resesi Ekonomi

**A**nggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar jangan menganggap remeh resesi ekonomi saat ini. Hal ini dalam merespons survei terkini dari perusahaan keuangan di Kota New York, Bloomberg, yang memasukkan Indonesia ke dalam 15 negara (peringkat 14) negara di dunia yang terancam resesi.

"Meski struktur dan fundamental ekonomi Indonesia dikatakan jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang terjadi di Sri Lanka, namun bukan berarti bebas ancaman resesi," ujar Kamrussamad sebagaimana **Parlementaria** kutip dari akun instagram pribadinya, Minggu (17/7).

Diketahui, dalam survei Bloomberg tersebut, terdapat beberapa negara lain yang terancam resesi, seperti Korea Selatan,

Jepang, China, Hongkong, Australia, Taiwan, Pakistan, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Indonesia, lalu India. Probabilitas resesi Indonesia dalam survei tersebut berada di angka 3 persen. Angka tersebut jauh di

Anggota Komisi XI DPR RI  
Kamrussamad.

bawah tingkat probabilitas resesi di beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Filipina (8 persen), Thailand (10 persen), Vietnam (10 persen), dan Malaysia (13 persen).

Karena itu, Kamrussamad ingatkan probabilitas tersebut agar menjadi perhatian pemerintah, terlebih saat ini, Cadangan Devisa (Cadev) Indonesia sudah berkurang sekitar 12 miliar dolar AS sejak September 2021. "Cadev itu terus berkurang dalam empat bulan terakhir ini. Apalagi ditambah tren *capital outflow* akibat kenaikan suku bunga The Fed," tutup

politisi Partai  
Gerindra  
tersebut. •  
rdn/sf



FOTO: MUNICHEN/NVL

”

PROBABILITAS  
RESESI INDONESIA  
DALAM SURVEI  
TERSEBUT BERADA  
DI ANGKA 3 PERSEN

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Sekjen DPR Lantik Pejabat Fungsional Auditor Ahli Utama Setjen DPR



FOTO: JAKA/NVL

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya

Sekjen DPR RI Indra Iskandar memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional Auditor Ahli Utama Setjen DPR RI.

**S**ekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar membuka acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional Auditor Ahli Utama di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Senin (18/7). Sekjen resmi melantik Setyanta Nugraha sebagai Pejabat Fungsional Auditor Ahli Utama yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR RI.

"Dengan adanya pelantikan Auditor Ahli Utama ini, saya

sangat berharap prestasi internal Sekretariat Jenderal DPR RI dapat dipertahankan dan ditingkatkan," ujar Indra saat pelantikan berlangsung. Perlu diketahui, jabatan Auditor Ahli Utama ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengendalian mutu internal Setjen DPR RI.

Jabatan ini mengemban tanggung jawab yang sangat besar dalam mendampingi keterangan ahli dalam proses penyidikan atau peradilan kasus hasil pengawasan, pengendalian mutu serta kegiatan evaluasi pengawasan.

"Menyadari posisi kita sebagai abdi negara, saya berharap kita menjadi lebih siap dan berkomitmen untuk bergerak lebih progresif meningkatkan pengawasan pemerintah guna meningkatkan layanan dan mewujudkan *good governance*," tutup Indra.

Dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini juga turut hadir para pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi dan Fungsional, serta para tamu undangan yang hadir melalui *virtual meeting*. • **adi,rnm/sf**



# BKSAP Dorong Target Pembangunan Tasikmalaya Selaras dengan **Kerangka Kerja SDGs**

**B**adan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Diplomasi Parlemen bertema "Urgensi SDGs dan Momentum *Parliamentary Speakers Summit P20 Indonesia 2022* dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya". Dalam sambutannya, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mendorong agar target pembangunan di kota maupun kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dapat selaras dengan kerangka kerja (*frame work*) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

"Satu hal yang penting, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya ini perlu menyesuaikan target pembangunannya dalam satu *framework* SDGs. Terdapat sebanyak 17 tujuan (*goals*), ada lebih dari 100 target. Misalnya tujuan nomor satu dan dua adalah nol kemiskinan dan kelaparan," ujar Fadli di depan peserta sosialisasi, di Kantor Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (20/7).

Sehingga, upaya untuk menghadirkan *zero poverty and hunger* tersebut dapat dimulai dari sektor yang sangat dominan di Tasikmalaya, yaitu pertanian. Sehingga, diharapkan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya beserta masyarakatnya dapat fokus meningkatkan pembangunan sektor pertanian yang berkualitas. Sehingga, berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Misalnya, Tasikmalaya cocok dengan pertanian.



Foto bersama Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI usai Sosialisasi Diplomasi Parlemen di Tasikmalaya.

Itu bisa mendatangkan PAD yang besar kalau dikelola dengan baik karena harga-harga komoditas pasti merangkak naik," tambah Fadli.

Di sisi lain, politisi Partai Gerindra ini turut mengingatkan, Indonesia pernah menjadi eksportir utama komoditas penting (*hot commodities*) ke beberapa negara di dunia saat masih dalam masa penjajahan Hindia-Belanda. Di antaranya adalah gula, cengkeh, dan tembakau. Namun, kini karena tata kelola yang kurang baik, akhirnya Indonesia alami kemunduran karena banyaknya impor komoditas.

Jika, Tasikmalaya fokus untuk mengembangkan sektor pertanian, maka tidak hanya berguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, tapi juga

bermanfaat sebagai ketahanan pangan secara nasional dengan memperbanyak lumbung-lumbung pangan yang dipasok dari wilayah subur seperti Tasikmalaya. "Jadi, kalau kita prioritaskan sektor pertanian itu sebenarnya sangat tepat di samping juga utuk ketahanan pangan kita," ujar Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini.

Diketahui, struktur perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh empat kategori lapangan usaha yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; serta industri pengolahan. Keempat sektor usaha tersebut telah menyumbang sebesar 70 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tasikmalaya. ● [rdn/sf](#)

Scan QR untuk berita selengkapnya





# Parlemen Remaja **2022**



**Generasi Sadar Privasi,  
Dataku Tanggung Jawabku!**

**10-14 Oktober 2022**

**Pendaftaran Dibuka:  
19 Juli - 19 Agustus 2022**